

PENANGANAN MASALAH-MASALAH SOSIAL DI KECAMATAN KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN SANGGAU

Ayu Widowati Johannes¹
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ayuwidowati@ipdn.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the handling of social problems that occur in the border area of Entikong. This study uses a descriptive research design, where the author can describe and describe the actual situation or reality about the analysis of social problems in the Entikong Border Area District systematically, factually and accurately about the facts and the relationship between the phenomena under study. The results showed that the handling of social problems in the border district in Sanggau Regency was carried out through the construction of infrastructure such as the construction of the National Development Plan and its supporting facilities, construction of access roads to the provincial, district and inter-village capitals; the construction of a superstructure which includes making development policies for border areas, institutions and environmental development; and community development through human resource development, village development, and community cultural development.

Keywords: Social Problems, Interactions, Country Border Areas

PENDAHULUAN

Perbatasan antar negara merupakan sebuah artefak yang tertera di atas lahan (tanah) pada kawasan wilayah tertentu dan terbentuk karena berbagai alasan yang diklasifikasikan sesuai dengan tujuan serta kepentingan mencakup aktivitas politik, sosial dan ekonomi. Dari perspektif lain, perbatasan dipandang sebagai artefak hasil proses diskursif yang menyebabkan terjadinya pagar pembatas wilayah dan pemisahan orang-orang yang bermukim dalam wilayah tersebut, proses demikian dapat berkembang dan berubah sesuai keinginan serta kesepakatan. Perbatasan seringkali menjadi fenomena yang terabaikan, walaupun selalu terlintas

dalam pikiran, namun kemudian dianggap sebagai hal yang tidak menjadi tujuan utama dan penting.

Beberapa masalah sosial sering terjadi di wilayah perbatasan, lebih unik dibandingkan dengan masalah sosial di wilayah non perbatasan. Patrice A C Vaeth, Miles and Rodriguez (2012), dalam penelitiannya dengan judul *Alcohol-related Social Problems among Mexican Americans Living in U.S.-Mexico Border and Non-border Areas*, menemukan bahwa minuman beralkohol tampaknya mempengaruhi lebih banyak di kalangan kaum muda di daerah perbatasan. Daerah perbatasan juga merupakan jalur masuk keluarnya perdagangan narkoba.

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, Pasal 5 menetapkan sembilan (9) kawasan perbatasan darat dan laut di Kalimantan. Kabupaten Sanggau termasuk dalam kawasan perbatasan darat. Kawasan perbatasan negara di Kabupaten Sanggau meliputi Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam. Interaksi masyarakat Indonesia dan Malaysia di kawasan kecamatan perbatasan Kabupaten Sanggau telah terjadi sejak dahulu sebelum era kolonial. Bahkan ketika Magelhaens berkunjung pada tahun 1520 melihat kota yang kaya dan padat penduduk, negara yang subur dan makmur, pangeran yang kuat dan istana yang megah (Henry Keppel and James Brooke, 1847: xvii)

Garis bataslah yang membatasi interaksi masyarakat di kedua wilayah negara Indonesia dan Malaysia saat ini. Interaksi masyarakat menghasilkan hubungan sosial terbatas secara administratif kepadudukan yang berbeda walaupun diantara masyarakat tersebut masih bertalian hubungan darah. Pembangunan di wilayah Sarawak-Malaysia berkembang lebih pesat dibandingkan dengan wilayah Kalimantan Barat-Indonesia. Wilayah Kawasan Kecamatan Perbatasan Entikong, Indonesia-Tebedu, Malaysia merupakan wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara dua negara dengan budaya yang pada dasarnya sama, namun berbeda keadaan ekonomi.

Di kawasan kecamatan perbatasan Entikong-Sekayam tersebut Suku Melayu, Dayak dan Cina telah saling berinteraksi satu sama lainnya sejak zaman dahulu. Interaksi sosial terjadi melalui perkawinan, perdagangan, pertanian dan sebagainya. Setelah negara Indonesia dan Malaysia merdeka, interaksi mereka terpisah oleh wilayah administrasi kedua negara.

Pertumbuhan ekonomi Sarawak cukup tinggi dengan adanya peningkatan komoditi ekspor. Titik berat pembangunan terletak pada bidang pertanian, dan perdagangan dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara optimal. Harga barang kebutuhan sehari-hari antara kota dan desa relatif sama dan stabil. Fasilitas yang terdapat di Sarawak antara lain fasilitas pendidikan yaitu sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi cukup banyak tersedia, yang berprestasi berkesempatan mendapat beasiswa gratis atau mendapatkan pinjaman lunak dari pemerintah. Pendidikan kejuruan cukup digalakkan untuk mengejar kemajuannya dari daerah semenanjung lain yang lebih maju dan baik (Dendy Kurniadi, 2009). Perkembangan sosial ekonomi di wilayah Serawak, Malaysia tersebut lebih cepat di bandingkan dengan kabupaten/kota wilayah di Kalimantan Barat, Indonesia, sehingga kadang menimbulkan masalah sosial di Kawasan Kecamatan Perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, Indonesia. Begitu kontrasnya pemandangan melihat wilayah Tebedu yang terlihat gedung, rumah dan jalanan rapi dan

teratur, dibandingkan dengan wilayah Entikong yang gedung, rumah dan jalanan yang kumuh dan kurang teratur.

Sementara tingkat kesejahteraan keluarga, menurut data BPS 2017 bahwa masih terdapat 723 jiwa jumlah keluarga pra sejahtera dibanding dengan 3194 keluarga sejahtera I dan II di Kecamatan Entikong dan Sekayam, terlihat bahwa masih terdapat 22.64% keluarga prasejahtera yang berada di wilayah kecamatan perbatasan Kabupaten Sanggau. Hal tersebut menandakan rendahnya tingkat kesejahteraan di kawasan perbatasan sehingga perlu menjadi penanganan serius bagi pemerintah pusat dan daerah karena dapat menimbulkan masalah sosial di kawasan perbatasan. Tingkat kesejahteraan yang rendah di kawasan perbatasan menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, prostitusi, kepadudukan dan tingkat kejahatan yang lebih tinggi di wilayah Indonesia di Entikong. dari data BPS tahun 2016 terdapat 20 tindak kejahatan terhadap badan dan 28 tindak kejahatan terhadap harta/benda di wilayah kecamatan Entikong. Selain itu wilayah perbatasan entikong merupakan pintu masuk bagi peredaran Narkoba yang berasal dari luar negeri karena masih terdapatnya jalan-jalan tikus diantara perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.

Di bidang kepadudukan, masih terdapatnya kewarganegaraan ganda pada beberapa penduduk di Perbatasan Entikong. Hal ini terjadi disebabkan beberapa desa di Entikong yang berbatasan langsung dengan dengan

kampung-kampung di Malaysia. Penduduk Desa Suruh Tembawang juga sering berniaga ke Gun Sapit karena memang masih memiliki hubungan kekerabatan kerana berasal dari etnis yang sama. Di saat petugas Jabatan Pendaftar Negara (JPN) Malaysia mendaftar, mereka turut mendaftar sehingga memperoleh IC Malaysia. (Nadia Nur Fitriani dkk 2016). Masalah prostitusi juga menjadi masalah yang serius di Kawasan Perbatasan Entikong. Pada Kawasan tersebut, masih terdapat beberapa lokasi "kopi pangku" (cafe tempat prostitusi) di sepanjang jalan Sekayam-Entikong. Hal ini juga masih menjadi masalah sosial yang belum tertangani sampai dengan sekarang.

Beberapa fenomena tersebut menjadikan daerah kawasan perbatasan menjadi suatu penting agar diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan Entikong. Pembangunan kawasan di daerah perbatasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat perlu dilakukan dengan serius. Berdasarkan indentifikasi masalah dan fenomena yang telah diuraikan di atas sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penanganan masalah sosial yang terjadi di kawasan Kecamatan perbatasan Entikong?

KAJIAN TEORI

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial karena interaksi

sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas aktivitas sosial. Bentuk lain proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perseorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. (Gillin and Gillin, 1945:489).

Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling bicara atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial walaupun orang-orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara atau saling bertukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi, karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syarat orang-orang yang bersangkutan, yang disebabkan oleh misalnya bau keringat, minyak wangi, suara berjalan dan sebagainya (Soerjono 2012:55).

Robert A. Nisbet (1961:12) mengemukakan bahwa masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Oleh sebab itu, masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran

masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. (Gillin and Gillin 1945: 323).

Problem-problem yang berasal dari faktor ekonomis antara lain kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Penyakit misalnya bersumber dari faktor biologis. Dari faktor psikologis timbul persoalan seperti penyakit syaraf (neurosis), bunuh diri, disorganisasi jiwa dan seterusnya. Sementara itu persoalan yang menyangkut perceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak, konflik rasial, dan keagamaan bersumber pada faktor kebudayaan. (Soekanto, 2012:314).

Dalam masyarakat merupakan gejala yang wajar jika sekelompok warga masyarakat menjadi pimpinan masyarakat tersebut golongan kecil tersebut mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih besar dari orang-orang lain untuk membuat serta menentukan kebijaksanaan sosial. Sukar untuk membayangkan bahwa setiap warga masyarakat harus menentukan nilai nilai sosial, kemudian dilebur menjadi satu pendapat. Hal ini tidak mungkin karena setiap manusia sesuai dengan kedudukan dan peranannya dalam lapisan masyarakat mempunyai

nilai dan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Apa lagi diferensiasi dalam masyarakat tersebut sangat tinggi sehingga mudah terjadi konflik antara nilai dengan kepentingan-kepentingan.

Masyarakat adalah suatu konsep yang mengandung unsur nilai-nilai manusia makhluk manusia orang penduduk warga masyarakat warga bangsa warga dunia rakyat dan yang diperintahkan utamanya adalah manusia sebagai subjek yang diperintah. Warga masyarakat merupakan proses akhir baik bersifat biologis maupun bersifat sosial suatu masyarakat terbentuk atas dasar motif kepentingan bersama (interesting vesting) kepemilikan nilai bersama (value sharing) serta proses pengelompokan (grouping) yang disebut proses dekat-mendekat (assosiatif) dan proses jauh-menjauh (disassosiatif). Dalam proses tersebut manusia berinteraksi satu sama lain baik secara individual maupun secara berkelompok. Proses interaksi yang bersifat Intens dan mulai terbuka pada keseriusan atas masalah bersama dan di sanalah masyarakat terbentuk. (Sumaryadi 2010:108).

Kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah di kedua negara yang berbeda menghasilkan ketimpangan diantara kedua wilayah perbatasan. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Serawak yang lebih baik dibandingkan di Provinsi Kalimantan Barat, menyebabkan banyaknya timbul masalah-masalah sosial di kawasan perbatasan Kalimantan Barat sebagaimana yang telah diuraikan

sebelumnya. Hal tersebut senada dengan pendapat Rubington dan Weinberg (1989), yang menyatakan sebagai berikut. Masalah sosial adalah suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga, yang sepakat bahwa suatu kegiatan bersama diperlukan untuk mengubah kondisi itu. (Tangdilintin and Presetyo, 2014)

Masalah-masalah sosial yang terjadi tersebut membutuhkan penanganan yang lebih serius di kawasan kecamatan perbatasan. Pengelolaan daerah perbatasan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keadaan politik dan pemerintahan di Indonesia sendiri. Pengelolaan Daerah Perbatasan di Indonesia secara umum dikembangkan oleh Badan Pengelolaan Perbatasan. Sedangkan secara sektoral dikembangkan oleh beberapa departemen dan lembaga pemerintah nondepartemental, serta lembaga-lembaga nonpemerintah yang dibina oleh Kementerian Dalam Negeri. Di Indonesia, pola pengembangan kawasan kecamatan perbatasan dalam kerangka Kementerian Dalam Negeri, diarahkan melalui pemberdayaan masyarakat (subkultur sosial, SKS), pengembangan ekonomi kawasan perbatasan (subkultur ekonomi, SKE) dan penataan kelembagaan di kawasan perbatasan (subkultur kekuasaan, SKK). Konsep interaksi subkultur dalam hubungan pemerintahan tersebut menggunakan pendekatan paradigma baru pemerintahan (governance), untuk mengkaji fenomena pemerintahan

sebagaimana konsep Kybernologi (Ndraha 2003).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, dimana penulis dapat menggambarkan dan menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya tentang analisa masalah-masalah sosial di Kecamatan Kawasan Perbatasan Entikong secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diformat ke dalam instrumen penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memahami sepenuhnya objek penelitian dan mengurangi bias yang mungkin ditimbulkan apabila peneliti terjun langsung kelapangan.

Guna memperoleh informasi yang jelas tentang masalah sosial dan upaya pemerintah dalam penanganannya dukungan, sumber data yang berasal dari person diambil melalui penentuan subyek penelitian. Peneliti memilih subyek penelitian dengan cara purposive, yaitu pemilihan subyek secara sengaja oleh peneliti menurut kriteria dan pertimbangan tertentu peneliti. Kriteria yang ditentukan peneliti bahwa subyek-subyek yang dipilih adalah mereka yang lebih mengetahui dan dapat memberikan informasi tentang masalah sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan kelembagaan, sehingga peneliti dapat

memperoleh informasi sebagai data primer dalam penelitian ini.

Dalam menentukan subyek penelitian didahului dengan penentuan Key Informan yang membuka jalan untuk penelitian ini. Key Informan merupakan orang yang paling berwenang dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan sehubungan dengan penanganan masalah sosial di kecamatan kawasan perbatasan, dan merupakan orang yang menjadi kunci pokok untuk mendapatkan data primer, karena dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan Key Informan lebih banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya oleh Key Informan peneliti dibantu dalam menentukan subyek-subyek penelitian yang telah ditentukan, karena Key Informan lebih tahu orang-orang yang dapat memberikan data-data yang dibutuhkan peneliti untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Daerah perbatasan merupakan daerah yang sering mengalami berbagai masalah sosial akibat ketimpangan tingkat kesejahteraan di antara ke dua negara. Masyarakat yang dimana tingkat kesejahteraannya lebih rendah akan berusaha mencari pekerjaan di daerah sebelah perbatasan yang lebih sejahtera dan menjanjikan berbagai pekerjaan dengan upah yang lebih baik di banding di daerah asalnya. Fenomena ini terjadi di berbagai wilayah perbatasan,

sehingga berbagai negara menerapkan kebijakan perbatasan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerah perbatasannya. Secara teori terdapat 3 (tiga) jenis tipe penerapan kebijakan terhadap pengelolaan daerah kawasan perbatasan yaitu border region, cross border region, dan trans border region. (Wu, 2001).

Dalam konteks pembangunan perbatasan, kebijakan keamanan yang selama ini menjadi pendekatan sentral pada kawasan perbatasan Indonesia, telah berdampak serius terhadap akses keadilan bagi masyarakat perbatasan dalam mendapatkan jatah pembangunan sosial-ekonomi yang setara dengan masyarakat di luar perbatasan. Namun, dalam perkembangan mutakhir Indonesia telah mengembangkan paradigma pengelolaan keamanan melalui pola pendekatan yang disebut dengan pendekatan komprehensif. Dalam pendekatan ini, berbagai faktor diintegrasikan seperti keamanan, kesejahteraan dan lingkungan. Secara praktis, perubahan paradigma dan pendekatan pembangunan perbatasan negara, khususnya di Kalimantan tersebut dapat dilacak melalui penelusuran kasus dan dinamika yang melingkupi hubungan kedua negara tersebut.

Hal ini juga berlaku pada kawasan perbatasan Kecamatan Entikong, dimana tingkat kesejahteraan masyarakat lebih rendah sehingga warga masyarakat berbondong-bondong menuju kota-kota di Malaysia untuk bekerja. Pemerintah Indonesia telah

membuat berbagai di wilayah perbatasan guna menangani ketimpangan tersebut. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan seperti pembangunan perbatasan baik melalui pembangunan infrastruktur, suprastruktur dan masyarakat, yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Penanganan masalah-masalah sosial di kawasan perbatasan kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau telah dilaksanakan sejak tahun 2015 yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan Pos Lintas Batas Negara beserta fasilitas pendukungnya, pembangunan akses jalan ke provinsi, kabupaten dan antar desa; pembangunan suprastruktur yang meliputi pembuatan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan, kelembagaan dan pembangunan lingkungan; dan pembangunan manusia melalui peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, pembangunan desa dan pembangunan budaya. Ke tiga pendekatan tersebut dilaksanakan guna peningkatan kualitas dan peningkatan perekonomian di Kecamatan Entikong.

Masalah-masalah sosial yang terjadi di kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau memerlukan pembangunan yang kompleks dan terpadu agar tidak ketinggalan dengan wilayah negara seberang sebagai mana gambar berikut:



Gambar 1
Penanganan Masalah Sosial Di Perbatasan Entikong

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia telah memberikan dampak yang berhasil guna bagi masyarakat Entikong khususnya yang berada di pusat kecamatan. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Entikong memberikan dampak yang positif bagi warga sekitar perbatasan. Pelayanan Pos Lintas Batas yang selama ini caruk marut dapat berubah menjadi teratur dan dapat mengurangi calo TKI ilegal.

Namun pada sisi lainnya, pembangunan kawasan perbatasan tersebut hanya dirasakan masyarakat Entikong yang berada di pusat kecamatan. Sementara warga masyarakat di Desa Suruh Tembawang dan Desa Palapasang serta Desa Nekan yang jauh dan masih sulit akses transfortasinya, belum terlalu berdampak. Apalagi dusun-dusun yang berbatasan langsung dengan kampung-kampung Malaysia. Akses masyarakat dengan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, budaya masih lebih mudah

dan cepat terlayani di kampung-kampung Malaysia. Hasil pertanian dan perkebunan tradisional masyarakat lebih bernilai tinggi bila mereka jual di Malaysia, dibandingkan di pusat kecamatan yang jarak tempuhnya masih jauh dan lama bila dibandingkan mereka menyebrang langsung melalui “jalan tikus” ke kampung di Malaysia. Belum lagi bila ditambah dengan biaya transfortasi menuju pusat Kecamatan Entikong. Hal yang sama bila masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, masyarakat di desa Suruh Tembawang dan Desa Palapasang, sampai saat ini masih kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.

Pembangunan Kawasan Perbatasan di pusat Kecamatan Entikong yang terlihat megah bahkan mengalahkan megahnya Pos Lintas Batas Negara Malaysia di Tebedu, namun belum menyentuh desa-desa sekitarnya. Desa-desa di luar pusat kecamatan, seperti Desa Suruh Tembawang dan Desa Palapasang tidak dapat menikmati megahnya

pembangunan kawasan perbatasan di PLBN Entikong yang bahkan mengalahkan megahnya Pos Lintas Batas di Tebeddu Malaysia. Masyarakat desa-desa perbatasan di luar kawasan PLBN tetap menggunakan “jalur tikus” atau jalur tradisional yang sudah biasa mereka lalui sejak dulu untuk menuju kampung-kampung dinegara seberang. Bahkan Camat Entikong, ketika mengunjungi dusun-dusun di perbatasan, seperti dusun Gun Sapit, lebih memilih jalan melalui Tebedu menuju kampung terdekat dengan dusun Gun Sapit, lalu menuju dusun tersebut. Hal ini dilakukan karena jarak tempuh yang lebih efisien dan lebih nyaman bila dibandingkan harus melalui jalan desa menuju Suruh Tembawang lalu ke dusun Gun Sapit.

Pembangunan Suprastruktur

Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pembangunan kawasan kecamatan perbatasan telah menjadi komitmen pemerintah Indonesia yang ditandai dengan bergulirnya beberapa kebijakan yang saling terpadu antara 18 kementerian yang di koordinasikan oleh BNPP. Upaya ini tercantum dalam Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla, yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan. Berdasarkan nawacita tersebut menjadi kebijakan pemerintahan dengan membangun kawasan permukiman perbatasan yang terbaik di “Beranda Depan Negara Republik Indonesia”. Bahkan didukung

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018.

Namun dalam implementasinya kebijakan pemerintah masih belum menyentuh kebutuhan real masyarakat perbatasan, kebijakan pembangunan kawasan PLBN, belum mampu menangani masalah sosial yang terjadi di perbatasan, khususnya di Kecamatan Entikong. Masalah sosial yang utama yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan di Kawasan Perbatasan Kecamatan Entikong memberikan dampak timbulnya masalah sosial yang lain seperti human traficking, penyelundupan barang, lokalisasi berkedok “kopi pangku”, kejahatan barang dan orang dan sebagainya.

Dari segi kebijakan pendekatan keamanan di wilayah perbatasan NKRI di Entikong telah dapat dikatakan terlaksana dengan baik, dengan adanya dukungan oleh aparat TNI yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan Satgas Pamantas yang bertugas selama 9 (sembilan) bulan secara bergantian dengan satuan lainnya. Bahkan Satgas Pamantas kadang juga bertugas membantu pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar bagi warga masyarakat di dusun sekitar perbatasan yang sulit di jangkau oleh para guru dan dokter.

Kemudian pada kebijakan pada pendekatan lingkungan, penerapan pendekatan ini belum terlalu terlihat. Memang ada penetapan hutan lindung di hutan sekitar Suruh Tembawang, perbatasan Indonesia-Malaysia di

Kalimantan Barat. Akan tetapi, sepanjang tepi sungai menuju Suruh Tembawang justru banyak terdapat hutan sawit. Selain itu, penetapan hutan lindung ini tidak memperhatikan kebutuhan dan budaya masyarakat lokal.

Dari segi kelembagaan, pengelolaan perbatasan dapat ditangani dengan baik oleh BNPP, khususnya PLBN Entikong yang mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang menyangkut perbatasan seperti imigrasi, bea cukai, karantina dan sebagainya di dalam lingkup Kawasan PLBN. Namun di luar dari kawasan PLBN, masalah sosial yang terjadi merupakan tanggung jawab camat sebagai kepala wilayah. Camat merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Camat di beri tanggungjawab yang besar untuk membangun wilayah kecamatan termasuk urusan perbatasan, tetapi camat tidak diberikan wewenang yang jelas karena turunan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Peraturan

Pemerintah No. 17 Tahun 2018 mengenai kecamatan di wilayah perbatasan dan urusan pemerintahan umum belum terbreakdown sampai saat ini.

Pembangunan Sumber Daya Masyarakat

Pembangunan manusia di PLBN belum menyentuh pemahaman masyarakat mengenai fungsi Pos Lintas Batas terhadap barang dan orang. Karena masih banyaknya masyarakat yang mengakali fungsi tersebut. Hal ini terlihat ketika para buruh pengangkut barang memilah-milah barang yang harus lewat PLBN dan yang lewat jalur diluar PLBN. Berdasarkan observasi yang dilakukan terlihat buruh angkut memilah barang yang nilainya tinggi untuk diangkut melalui jalur di luar PLBN, sehingga barang-barang tersebut di tidak masuk pada pos lintas batas, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1
Aktifitas Buruh Angkut di PLBN Entikong.

Aktivitas tersebut tidak dapat dihentikan oleh petugas di PLBN, karena aktifitas masyarakat tersebut berada di luar kewenangan PLBN berada di wilayah “Zona Netral” antara perbatasan kedua negara. Hal ini yang juga menjadi dilema bagi aparat dan masyarakat.

Dalam rangka mengurangi aktifitas buruh angkut agar tidak mengangkut barang dari luar negeri menuju keluar PLBN, tidak dapat dengan hanya mengharapkan aparat keamanan dan Pamtas saja, diperlukan sosialisasi yang intensif dan tepat sasaran, perlu juga dilakukan pembukaan lapangan kerja melalui usaha UMKM dan pengembangan tempat-tempat wisata di sekitar Entikong. Sosialisasi, pembukaan lapangan kerja melalui UMKM dan pengembangan tempat wisata diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, yang selama ini masih kurang dilakukan pada kecamatan perbatasan termasuk Kecamatan Entikong.

Pembangunan masyarakat di kawasan perbatasan Kecamatan Entikong perlu di seriusi oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah kabupaten Sanggau. Peningkatan mutu pendidikan, perbaikan pelayanan kesehatan, peningkatan keamanan dan perbaikan layanan kependudukan serta pengembangan lapangan pekerjaan diharapkan mampu mengatasi masalah sosial yang terjadi di daerah perbatasan Entikong yang diakibatkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat di antara kedua negara.

KESIMPULAN

Penanganan masalah- masalah sosial di kawasan kecamatan perbatasan di Kabupaten Sanggau dilakukan melalui pembangunan infrastruktur seperti pembangunan PLBN beserta fasilitas pendukungnya, pembangunan akses jalan menuju ibukota provinsi, kabupaten dan antar desa; pembangunan supprastruktur yang meliputi pembuatan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, kelembagaan dan pembangunan lingkungan; dan pembangunan masyarakat melalui pembangunan sumber daya manusia, pembangunan desa, dan pembangunan budaya masyarakat.

Penanganan masalah- masalah sosial di kawasan kecamatan perbatasan di Kabupaten Sanggau khususnya di Kecamatan Entikong perlu dilakukan dengan beberapa program pengembangan Kawasan Kecamatan Perbatasan Entikong yang diselenggarakan secara terpadu diantara beberapa kementerian dan instansi yang terkait. Program program alternatif kegiatan pengembangan Kawasan Kecamatan Perbatasan antara lain yaitu; Pengembangan Kawasan Kecamatan Perbatasan Entikong menjadi kota kecil yang memanjang searah kawasan perbatasan, Perlunya perubahan dan peningkatan kelembagaan kecamatan di wilayah perbatasan, sesuai tupoksi dan tanggungjawab camat perbatasan yang lebih dibanding camat biasanya diluar perbatasan, Perlunya peningkatan lapangan pekerjaan yang memadai bagi

masyarakat, seperti pengembangan UMKM di wilayah kecamatan perbatasan dan pengembangan produk pilihan seperti lada, dan Perlunya pengembangan tempat wisata di Kecamatan Entikong yang dapat menambah pendapatan warga masyarakat sekitar tempat wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Gillin and Gillin, 1945, *Cultural Sociology, a revision of an introduction to sociology*, New York Macmillan Company.

Henry Keppel, James Brooke, 1847, *The expedition to Borneo of H.M.S. Dido for the suppression of piracy*, Volume 2, Gyan Books Pvt. Ltd. (Delhi, India).
<https://play.google.com/books/reader?id=3jENAAAIAAJ>

Kurniadi, Dendy. 2009. *Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota, Universitas Diponegoro

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta, Jakarta.

Nisbet, Robert A., (1961), "The Studi Of Social Problems", dalam *Contemporary Social Problems* (Robert K. Morten dan Robert A. Nisbet, Ed), New York: Harcourt Braco and World

Rubington, E. dan Wainberg, M.S. (1995). *The Study of Social Problems, Seven Perspective*.

New York. USA: Oxford University Press.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta.

Sumaryadi, I. Nyoman, 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.

Tangdilintin, H. L. (2014). *Toraja dan Kebudayaannya*. Rantepao: Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan

Vaeth PA, Caetano R, Mills BA, Rodriguez LA. Alcohol-related social problems among Mexican Americans living in U.S.-Mexico border and non-border areas. *Addict Behav.* 2012;37(8):998–1001.
doi:10.1016/j.addbeh.2012.04.004

https://www.researchgate.net/publication/224917203_Alcohol-related_Social_Problems_among_Mexican_Americans_Living_in_US-Mexico_Border_and_Non-border_Areas

Wu, C. T. 2001. *Cross-Border Development in a Changing World: Redefining Regional Development Policies*. In Edgington, D.W., Fernandez, A. L. and Hoshino, C. (eds). *New Regional Development Paradigm*. Vol. 2. London: Greenwood Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2018 tentang Kecamatan

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun
2015 Tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Perbatasan
Negara Di Kalimantan.